

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Teori keagenan menyatakan bahwa hubungan keagenan merupakan sebuah persetujuan (kontrak) di antara dua pihak, yaitu prinsipal dan agen, dimana principal memberi wewenang kepada agen untuk mengambil keputusan atas nama prinsipal (Jensen & Meckling, 1976) Teori keagenan dapat digunakan untuk memahami hubungan antara salah satu pihak (prinsipal) membuat suatu kontrak, baik secara implisit maupun eksplisit dengan pihak lain (agents) dengan harapan bahwa agen akan bertindak atau melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan principal.

Menurut (Jensen & Meckling, 1976) adanya masalah keagenan memunculkan biaya agensi yang terdiri dari:

- a. The monitoring expenditure by the principle, yaitu biaya pengawasan yang dikeluarkan oleh prinsipal untuk mengawasi perilaku dari agen dalam mengelola perusahaan.
- b. The bounding expenditure by the agent (bounding cost), yaitu biaya yang dikeluarkan oleh agen untuk menjamin bahwa agen tidak bertindak yang merugikan prinsipal.
- c. The Residual Loss, yaitu penurunan tingkat utilitas prinsipal maupun agen karena adanya hubungan agensi.

Keterkaitan adanya *agency theory* dalam penelitian ini dapat dilihat dalam pelaporan keuangan, yang dimana pemerintahan pihak yang berperan sebagai principal atau pemberi wewenang merupakan pemerintah pusat, sedangkan yang berperan sebagai agen atau yang melaksanakan tugas/wewenang merupakan pemerintah daerah. Tetapi pada teori ini juga terdapat adanya anggapan bahwa pihak agen tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan principal. Pihak agen mengelola pemerintahan daerahnya masih dengan ketergantungan pada pemberian bantuan dana transfer pemerintah pusat

yang menyebabkan menjadi tidak mandirinya daerah tersebut. Perbedaan kepentingan antara principal dan agen ini menjadi dasar munculnya teori ini karena hubungan keagenan tersebut terkadang dapat menimbulkan masalah antara prinsipal dan agen.

Sebagai agen, pemerintah daerah secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan pendapatan daerah kepada pemerintah pusat (principal), namun disisi yang lain pemerintah daerah juga mempunyai kepentingan memaksimalkan kesejahteraan mereka. Dalam hal ini tentu saja dapat memunculkan kemungkinan besar agen tidak selalu menjalankan dan melakukan sistem pemerintahan yang terbaik demi kepentingan principal (Halim & & Abdullah, 2016).

## **2.1.2 Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

### **2.1.2.1 Laporan Keuangan**

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 pengertian laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi. Sebagai hasil akhir dari proses akuntansi, laporan keuangan menyajikan informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan menggambarkan pencapaian kinerja dari program dan kegiatan realisasi dari pencapaian target pendapatan, penyerapan belanja, dan pembiayaan (Bastian. 2010:97).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010 meliputi:

#### **1. Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

#### **2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih**

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan

tahun sebelumnya.

### 3. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

### 4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

### 5. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

### 6. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.

### 7. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

PP No. 71 Tahun 2010 tentang penyajian laporan keuangan menyebutkan bahwa pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat, bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan.
- b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

#### **2.1.2.2 Kualitas Informasi Laporan Keuangan**

Berdasarkan PP No. 71 tahun 2010, untuk menghasilkan laporan keuangan yang bermanfaat bagi para pemakainya, maka informasi yang terdapat dalam laporan tersebut harus berkualitas dan berguna dalam pengambilan keputusan. Kualitas laporan keuangan tersebut tercermin dari karakteristik kualitatif. karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normative yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

- a. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa

lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan memiliki karakteristik yang terdiri dari:

1. Memberikan manfaat umpan balik (*feedback value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu. Laporan keuangan berkualitas jika dapat memberikan manfaat untuk evaluasi kinerja masa lalu dan memberikan umpan balik dalam rangka perencanaan keuangan dan perbaikan kinerja di masa datang.

2. Memberikan manfaat prediktif (*predictive value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini. Laporan keuangan berkualitas jika dapat memberikan manfaat untuk memprediksi kondisi keuangan, kebutuhan keuangan, dan kinerja di masa datang.

3. Disajikan tepat waktu (*timeliness*)

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

4. Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, memperhatikan kendala yang ada.

b. Andal (*reliability*)

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik yang terdiri dari:

1. Penyajian jujur (*faithfulness of presentation*)

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk

disajikan. Laporan keuangan yang berkualitas terbebas dari salah saji material dan tidak ada manipulasi laporan keuangan.

2. Dapat diverifikasi (*verifiability*)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan kesimpulan yang tidak berbeda jauh. Laporan keuangan berkualitas jika dapat diverifikasi kebenarannya melalui proses audit independen.

3. Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu. Penyajian laporan keuangan tidak bersifat bias terhadap kepentingan kelompok tertentu.

c. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadi perubahan.

d. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

### 2.1.3 Sistem Pengendalian Intern

Menurut PP No. 60 Tahun 2008, Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Unsur Sistem Pengendalian Intern dalam PP No. 60 Tahun 2008 yaitu:

#### a. Lingkungan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat.

#### b. Penilaian Risiko

Pengendalian intern harus memberikan penilaian atau risiko yang di hadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam. Penilaian risiko diawali dengan penetapan maksud dan tujuan Instansi Pemerintah yang jelas dan konsisten baik pada tingkat instansi maupun pada tingkat kegiatan. Selanjutnya Instansi Pemerintah mengidentifikasikan secara efisien dan efektif risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut, baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi.

#### c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian intern adalah kebijakan dan prosedur yang dapat membantu memastikan dilaksanakannya arahan pimpinan Instansi Pemerintah untuk mengurangi risiko yang telah diidentifikasi selama proses penilaian risiko.

#### d. Informasi dan Komunikasi

Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan Instansi Pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan Instansi Pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggungjawab nya. Instansi Pemerintah harus memiliki informasi yang relevan dan dapat diandalkan baik informasi keuangan maupun non keuangan, yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa eskternal serta internal. Informasi tersebut harus direkam dan dikomunikasikan kepada pimpinan Instansi Pemerintah yang memerlukannya dalam bentuk serta dalam kerangka waktu yang memungkinkan yang bersangkutan melaksanakan pengendalian intern dan tanggungjawab operasional.

#### e. Pemantauan

Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan reuiu lainnya dapat segera ditindaklanjuti. Pemantauan sistem pengendalian intem dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reuiu lainnya. Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin. supervisi, pembandingan, rekonsiliasi dan tindakan lain yang terkait dalam peiaksanaan tugas.

### **2.1.4 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**

SAKD meruapakan serangkaian prosedur yang terdiri dari pengumpulan data, kemudian pencatatan, lalu dilakukan pengikhtisaran, kemudian sampai dengan pelaporan keuangan sebagai pertanggungjawaban dari pelaksanaan APBD yang caranya dengan manual atau dengan menggunakan aplikasi komputer. Dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 SAKD juga merupakan sistem akuntansi yang terdiri dari seperangkat kebijakan, standar dan prosedur yang dapat menghasilkan laporan yang andal, relevan dan tepat waktu untuk menghasilkan informasi



berbentuk laporan keuangan yang akan digunakan oleh pihak pemerintah maupun non-pemerintah dalam pengambilan keputusan.

#### **2.1.4.1 Prosedur Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**

(Halim, 2012:84) Menjelaskan sistem akuntansi pemerintah daerah secara garis besar terdiri atas empat prosedur akuntansi yaitu akuntansi penerimaan kas, akuntansi pengeluaran kas, akuntansi selain kas, dan akuntansi asset, dan disempurnakan oleh permendagri menjadi 5 prosedur sistem akuntansi keuangan daerah yang meliputi sebagai berikut:

1. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas Prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPKD adalah serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.
2. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas Prosedur akuntansi pengeluaran kas adalah serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi atau kejadian keuangan, hingga pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan pengeluaran kas pada SKPD dan/atau SKPKD.
3. Prosedur Akuntansi Aset Tetap/Barang Milik Daerah Prosedur akuntansi asset adalah serangkaian proses, baik manual maupun komputerisasi, mulai dari pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, hingga pemeliharaan, rehabilitas, penghapusan, pemindah tanganan, perubahan klasifikasi dan penyusutan terhadap asset yang dikuasai/digunakan SKPD atau SKPKD. Prosedur akuntansi asset digunakan sebagai alat pengendali dalam pengelolaan asset yang dikuasai/digunakan SKPD atau SKPKD.
4. Prosedur Akuntansi Selain Kas Prosedur akuntansi selain kas adalah serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

5. Penyajian Laporan Keuangan Secara garis besar, tujuan umum penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan.

Terdapat indikator sistem akuntansi keuangan daerah Berdasarkan Pemdagri No. 59 Tahun 2007 dalam penelitian (Siahaya et al., 2018) meliputi:

1. Pencatatan

- a. Identifikasi serta mengukur gambaran dari lampiran suatu transaksi dan bukti dari kegiatan pencatatan yang telah dilakukan
- b. Buku harian yang dicatat berdasarkan dari bukti-bukti transaksi
- c. Kategori buku besar yang telah disusun berdasarkan jurnal.

2. Pengikhtisaran

- a. Aktivitas yang berupa merancang neraca yang bersumber dari pencatatan ledger akhir dari suatu periode
- b. Membuat konsep dari jurnal penyesuaian yaitu melakukan penyesuaian akun yang belum up to date berdasarkan informasi/keterangan yang terbaru
- c. Menyusun neraca lajur adalah konsep dalam melakukan pembuatan dari suatu laporan keuangan
- d. Membuat jurnal penutup merupakan rancangan dari gambaran prosedur yang kegiatannya melakukan posting ke akun-akun yang berhubungan yang akan merubah nominal menjadi nol
- e. Menyusun neraca saldo yang terjadi setelah penutupan merupakan gambaran dari neraca memiliki suatu kelompok akun sebenarnya yang disusun apabila telah ditutup.
- f. Membuat konsep dari jurnal pembalik yaitu sangat diperlukan bila telah membuat penutupan neraca saldo.

3. Pelaporan

Setelah berakhir suatu proses, maka yang perlu dilakukan adalah melakukan kegiatan pelaporan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah dan pelaporan atas penyusunan laporan keuangan.

### **2.1.5 Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Teknologi informasi merupakan sarana yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, dan menyimpan data dengan berbagai macam cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas.

Teknologi informasi saat ini dapat meliputi komputer (mainframe, mini, micro), perangkat lunak (software), database, jaringan (internet, intranet), electronic commerce, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson et al., 2000).

Williams dan Sawyer (2003) dalam (Yusnita, 2017) mendefinisikan teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputasi (komputer) dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara dan video.

Perkembangan teknologi semakin lama semakin meningkat. Teknologi Informasi (TI) ini berkembang sejalan dengan perkembangan peradaban manusia. Pemanfaatan teknologi informasi merupakan suatu proses pengolahan dan penyebaran data dengan memanfaatkan alat perangkat komputer dan telekomunikasi untuk kegiatan yang dilakukan seseorang. Teknologi informasi di Indonesia ikut berkembang sejalan dengan perkembangan peradaban manusia yang semakin modern. “Perkembangan teknologi informasi meliputi perkembangan *hardware*, *software*, teknologi penyimpanan data, dan teknologi komunikasi”(Laudon.K.C., 2014).

Dengan berkembangnya teknologi informasi yang semakin maju akan memudahkan penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan informasi keuangan karena memiliki kekuatan yang lebih akurat dan tepat serta memiliki kemampuan menyimpan data yang lebih besar. Pekerjaan yang dilakukan akan lebih efektif dan efisien, akan tetapi dengan berkembangnya teknologi informasi ini akan membutuhkan dana yang lebih besar.

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pemanfaatan Teknologi

Informasi terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti yang dirangkum dalam tabel 2.1:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	Emilda Nur Safiri dan Pingky Dezar Zulkarnain (2021)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	<b>Independen:</b> Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi  <b>Dependen:</b> Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor.	Sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal secara parsial tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, teknologi informasi berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
2	Teguh Erawati, Muhammad Firas Abdulhadi (2018)	Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	<b>Independen:</b> Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi <b>Dependen:</b> Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Yogyakarta.	Secara parsial, sistem akuntansi keuangan daerah, kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan pemanfaatan teknologi berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.
3	I Kang Murapi, (2020)	Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas	<b>Independen:</b> Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi	Secara parsial, Penerapan Sistem akuntansi keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi

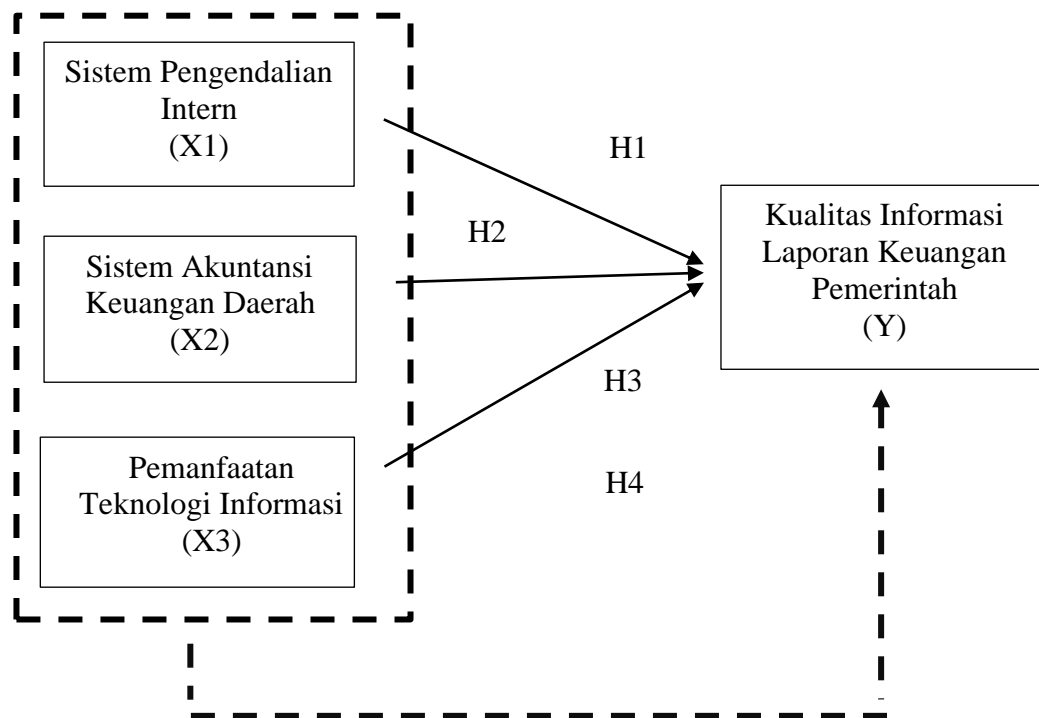
		Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah	<b>Dependen:</b> Kualitas Informasi pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	dan Komitmen Organisasi Pemerintah berpengaruh positif Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
4	Novtania Mokoginta, Linda Lambey dan Winston Pontoh (2017)	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah	<b>Independen:</b> Sistem Pengendalian Intern dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah <b>Dependen:</b> Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah	Sistem Pengendalian Intern dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah memiliki berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.
5	Rahman Arif (2017)	Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi dan Kejelasan Tujuan Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kota Padang Panjang).	<b>Independen:</b> Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi dan Kejelasan Tujuan <b>Dependen:</b> Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kota Padang Panjang).	Pemanfaatan teknologi informasi Tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah, Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah, Kejelasan tujuan berpengaruh n positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah
6	Raja Yoga Gustika Armel Armel (2017)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan	<b>Independen:</b> Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan	Kompetensi sumber daya manusia, standar akuntansi pemerintahan, penggunaan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap

		Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Dumai).	Sistem Pengendalian Internal <b>Dependen:</b> Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Dumai).	kualitas pelaporan keuangan.
7	AS Syifa Nurillah (2014)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada SKPD Kota Depok)	<b>Independen:</b> Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern <b>Dependen:</b> Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada SKPD Kota Depok)	Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Sumber: Penelitian terdahulu 2014-2021

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh sistem pengendalian intern, sistem akuntansi keuangan daerah dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas informasi keuangan pemerintah daerah. Hubungan variabel dalam penelitian ini diilustrasikan melalui kerangka konseptual, yang digunakan untuk merumuskan hipotesis dalam penelitian ini yaitu pada gambar 2.1.



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

Keterangan:

- : Pengaruh Secara Parsial  
 - - - - : Pengaruh Secara Simultan

#### 2.4 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, yang mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Kemudian dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, namun belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Adapun hipotesis yang diuraikan dalam penelitian ini adalah:

$H_1$  : Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang.

$H_2$  : Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang.

*H*<sub>3</sub> : Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang.

*H*<sub>4</sub> : Sistem Pengendalian Intern, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang.